

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amana. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasasn. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan yang diserahkan kepada pemerintah daerah;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang perikanan dan kelautan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- c. melaksanakan kewenangan kabupaten/kota di bidang perikanan dan kelautan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan kelautan;
- c. pelaksanaan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
- d. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan kekayaan sumber hayati di wilayah laut provinsi;
- e. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut provinsi;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengujian standar mutu hasil perikanan;
- g. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut provinsi;
- h. pelaksanaan pengelolaan perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut provinsi;
- i. pelaksanaan perumusan penetapan standard pelayanan perbenihan ikan;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan ekspor komoditas perikanan unggulan;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan;
- l. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar kabupaten dan atau kota di bidang perikanan dan kelautan;
- m. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah hama penyakit menular dibidang perikanan;
- n. pelaksanaan penyidikan, pemanfaatan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif penyakit ikan;
- o. pelaksanaan fasilitasi usaha penangkapan ikan di perairan wilayah laut nasional, zona ekonomi eksklusif maupun perairan bebas;
- p. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dengan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD adalah sebagai berikut :

1. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan

Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan
- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional penangkapan dan pelelangan ikan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional penangkapan dan pelelangan ikan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penangkapan dan pelelangan ikan
- c. Pelaksanaan pengawasan pengendalian alat tangkap
- d. Pelaksanaan fasilitas penangkapan ikan
- e. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru penangkapan ikan
- f. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi kelayakan kapal penangkapan ikan
- g. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan



- h. Pengkajian dan analisis teknis operasional penangkapan dan pelelangan ikan
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas
- j. Pengelolaan ketatausahaan

2. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan

Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan
- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan
- c. Pelaksanaan fasilitas teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat
- d. Penyediaan benih dan calon induk ikan unggul
- e. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan
- f. Penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum
- g. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan
- h. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas
- j. Pengelolaan ketatausahaan

3. Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan
- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu hasil perikanan
- d. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pengajuan penetapan sertifikasi kelayakan pengolahan ikan
- e. Pelaksanaan penertiban sertifikasi kesehatan mutu ikan ekspor
- f. Pengkajian dan analisis teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan
- g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas
- h. Pengelolaan ketatausahaan

4. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan
- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai
- b. Penyiapan bahan rencana dan program, informasi, pengumpulan data, identifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai



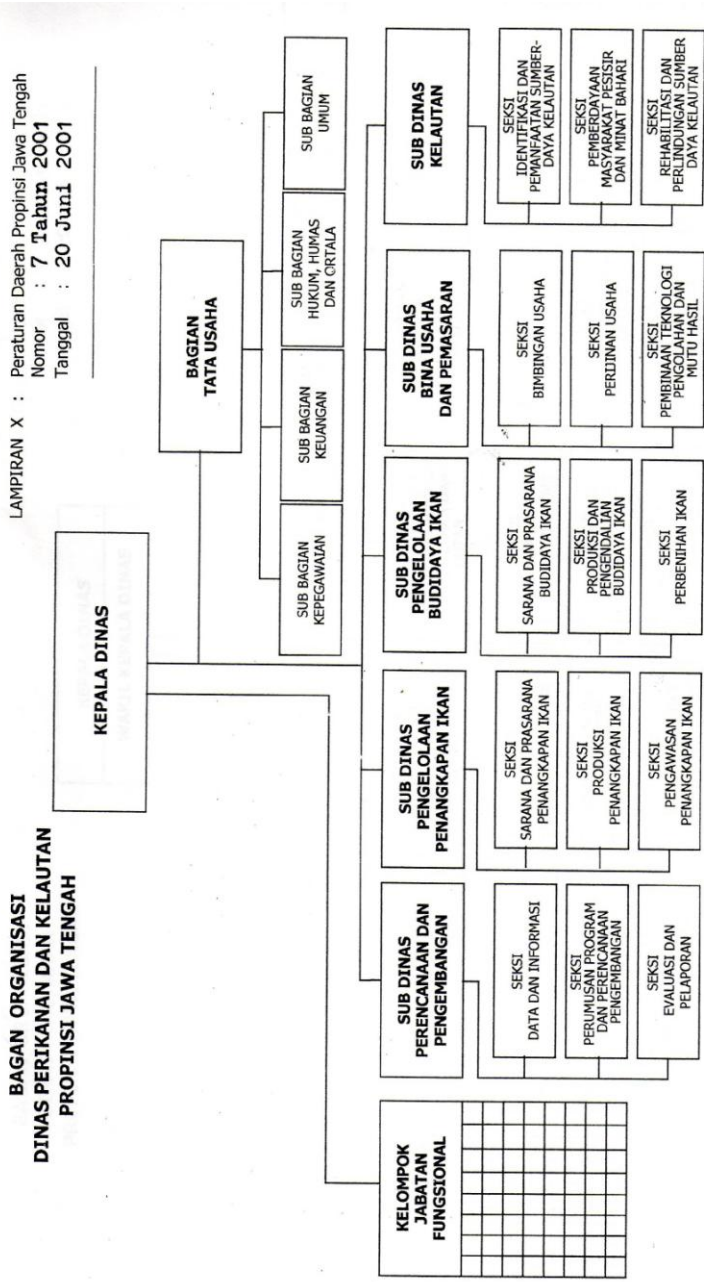
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasioanl pelabuhan perikanan pantai
- d. Pelaksanaan program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengelolaan keamanan dan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan pantai
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan kesyahbandaraan, pengelolaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan
- f. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan ikan untuk kelestariannya
- g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas
- h. Pengelolaan ketatausahaan

Namun demikian pada tahun 2008 telah disusun SOTK baru, dimana berdasar SOTK baru tersebut jumlah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berubah menjadi 15 unit dari yang semula 6 unit. UPTD tersebut adalah :

1. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Semarang;
2. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Pekalongan;
3. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Cilacap;
4. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan;
5. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Maribaya;
6. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan;
7. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung;
8. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo;
9. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang;
11. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor;
12. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto;
13. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong;
14. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari;
15. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa.

Untuk lebih lengkapnya perubahan-perubahan yang ada pada SOTK baru dapat dilihat pada ilustrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. di bawah ini :





GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Ilustrasi 1. Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng

LAMPIRAN XXXII A

: Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1 Tahun 2002

Tanggal : 2 April 2002

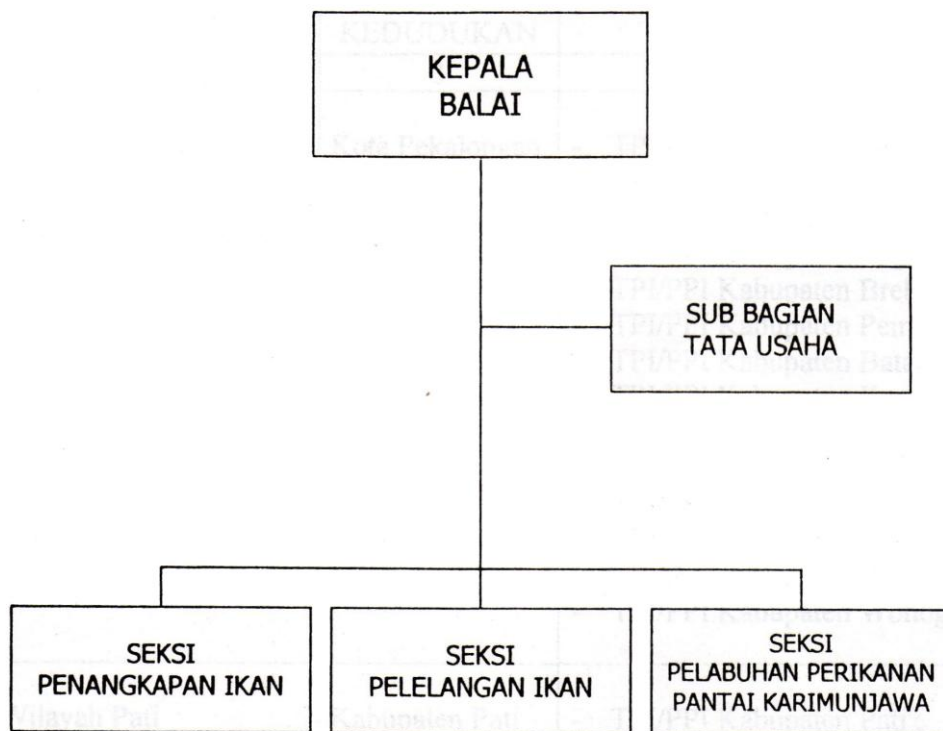
**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN
WILAYAH PEKALONGAN DAN WILAYAH CILACAP**



lustrasi 2. Bagan Organisasi Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pekalongan dan Cilacap

LAMPIRAN XXX B : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 1 Tahun 2002
Tanggal : 2 April 2002

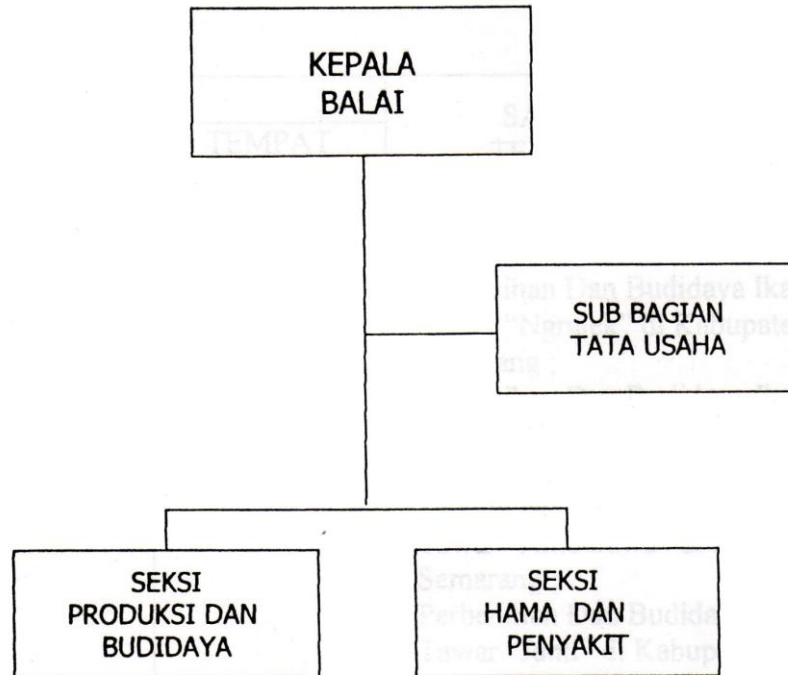
**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN
WILAYAH PATI**



Ilustrasi 3. Bagan Organisasi Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati

LAMPIRAN XXXI A : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 1 Tahun 2002
Tanggal : 2 April 2002

**BAGAN ORGANISASI
BALAI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN**



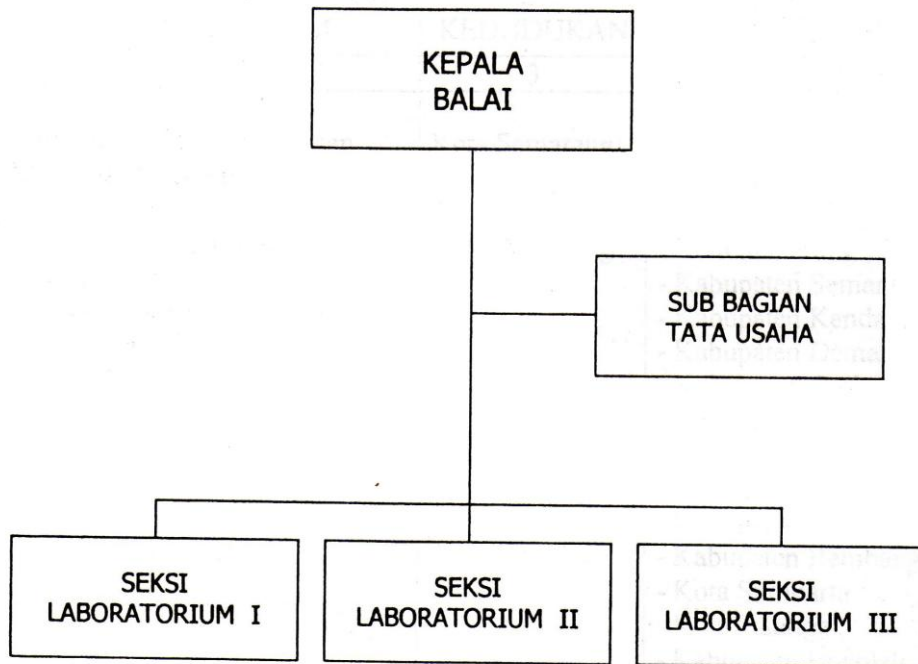

GUBERNUR JAWA TENGAH
HARDIYANTO

Ilustrasi 4. Bagan Organisasi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan

LAMPIRAN XXXII A

: Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 1 Tahun 2002
Tanggal : 2 April 2002

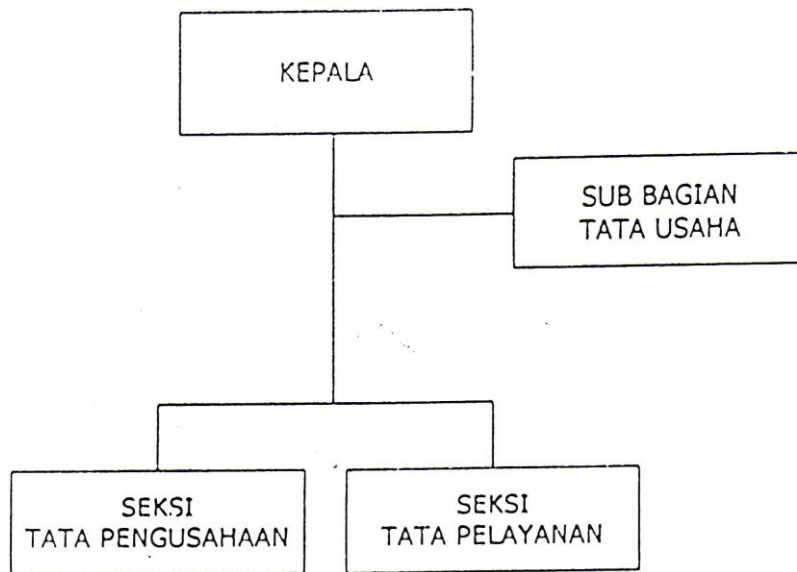
**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN**



Ilustrasi 5. bagan organisasi Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 MARET 2006

BAGAN ORGANISASI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI



GUBERNUR JAWA TENGAH


MARDIYANTO

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 384 orang personel (Data sampai Desember 2008). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1. Jumlah PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	SD	21 orang	
2.	SMP	16 orang	
3.	SMU	181 orang	
4.	Sarjana Muda / D3	25 orang	
5.	Sarjana / D4 / S1	104 orang	
6.	Pasca Sarjana / S2	37 orang	
7.	Doktor / S3	0 orang	
	JUMLAH	384 orang	

Peran seperti tersebut di atas secara umum telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil yang baik karena keberhasilannya dalam penerapan manajemen instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi secara efisien. Strategi yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor di lingkungan internal maupun eksternal dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Sebagai proses penetapan keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik, strategi merupakan perwujudan dari koordinasi dalam implementasi kegiatan-kegiatan tersebut. Koordinasi dan komunikasi akan mencairkan kebekuan dan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. Implementasi koordinasi menjadi lebih sulit dengan adanya ego sektoral, prioritas alokasi sumberdaya dan lain-lain.

Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkemungkinan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Penyampaian informasi secara tertulis, periodik dan melembaga mutlak diperlukan sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dalam mengungkapkan dan mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan latar belakang tersebut di atas, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2008.

BAB II RENCANA STRATEJIK

A. RENCANA STRATEJIK

Perencanaan Strategik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2003 – 2008, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategik (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi, baik di jajaran structural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI

Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan mempunyai visi, yaitu :
“Terwujudnya sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber utama penghidupan, pendapatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan”.

2. MISI

Disamping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan Pembangunan Perikanan sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai Misi, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- b. Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan;
- c. Mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- d. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;
- e. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan;
- f. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
- g. Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan;
- h. Peningkatan dan penguatan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan serta potensi pasar;
- i. Memberdayakan sosial ekonomi masyarakat pesisir.



3. NILAI-NILAI

Dalam melaksanakan misinya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah menggunakan nilai-nilai yang mendukung azas sebagai berikut : BERICHTIAR (**BRILLIANT, EMPHATY, RESPECT, INNOVATIVE, COMMITMENT, HONESTY, TOGETHERNESS, INTEGRITY, ASSIST, RESPONSIVE**)

- a. **Brilliant**, yaitu selalu berpikir cerdas dalam bekerja
- b. **Emphaty**, yaitu berperilaku santun, memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain
- c. **Respect**, yaitu saling menghormati serta menghargai terhadap sesama
- d. **Innovative**, yaitu selalu mengedepankan inovasi baru, mau dan mampu mengadakan pembaharuan sesuai tantangan
- e. **Commitment**, yaitu selalu berpegang teguh dalam menjalankan tugas
- f. **Honesty**, yaitu selalu jujur dalam bertugas
- g. **Togetherness**, yaitu menjunjung tinggi rasa kebersamaan, saling menghormati dan saling menghargai
- h. **Integrity**, yaitu menjunjung integritas dan moralitas dalam berkarya
- i. **Assist**, yaitu saling tolong menolong dan bekerjasama berdasarkan persahabatan atau kooperatif
- j. **Responsive**, yaitu responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi

4. TUJUAN DINAS

Pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan (2003 - 2008) mempunyai tujuan :

- a. Peningkatan produksi perikanan sebagai sektor unggulan
- b. Rehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut, dan restocking jenis sumberdaya ekonomis penting
- c. Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk hasil-hasil perikanan
- d. Meningkatkan pendapatan petani nelayan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan komoditas perikanan
- f. Menghasilkan produk-produk perikanan berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor
- g. Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis
- h. Keberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir

5. SASARAN / TARGET

Mengingat adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2001 ini dimulai bulan Januari hingga Desember, maka sasaran pembangunan perikanan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2008 juga menyesuaikan waktu yang telah ditentukan, yaitu dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sebagaimana sasaran di bawah ini



5.1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Volume produksi perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2003 - 2008 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 1,90 % per tahun, sedangkan nilainya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 7,20 % per tahun. Tabel volume dan nilai produksi perikanan tersebut akan diperoleh dari usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

5.1.1. Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 1,30 % per tahun, dimana diperkirakan pencapaian produksi perikanan laut pada tahun 2004 sebesar 287.488,91 ton dan pada tahun 2008 mencapai 300.348,67 ton atau kurang lebih mencapai 70,28 % dari total produksi perikanan Jawa Tengah, sedangkan nilainya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 6,10 % per tahun.

5.1.2. Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 4,20 %, dimana pada tahun 2004 produksi perikanan budidaya sebesar 84.797,99 ton dan pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 100.646,59 ton. Sedangkan nilainya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 8,30 % per tahun.

5.2. Ekspor Hasil Perikanan

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2003 - 2008, volume ekspor hasil perikanan di Jawa Tengah diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 7,40 % per tahun, dimana pada tahun 2004 mencapai 15.304 ton dan pada tahun 2008 mencapai 22.036 ton. Demikian juga nilai ekspornya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 7,50 % per tahun, yaitu dari US \$ 69.400.000 (2004) menjadi US \$ 92.700.000 (2008)

5.3. Konsumsi Makan Ikan

Dalam periode tahun 2003 - 2008, konsumsi makan ikan di Jawa Tengah diproyeksikan meningkat 2,40 % per tahun, dimana pada tahun 2004 sebesar 12,70 % kg/kap hingga pada tahun 2008 mencapai 13,93 kg/kap.

Padahal menurut standar nasional konsumsi makan ikan sebesar 18 kg/kap (WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI, 1983). Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan terutama bagi golongan penduduk berpenghasilan rendah terus dilakukan dengan melalui pemberian paket-paket kolam ikan air tawar, paket budidaya ikan dalam karamba maupun usaha-usaha memasyarakatkan dan mempromosikan makan ikan.

6. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan pada tahun 2008 diarahkan untuk keseimbangan pembangunan perikanan dan kelautan di Pantai Utara dan Pantai Selatan yang ditekankan pada :

a. Peningkatan produksi melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan

Sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi sumberdaya pulih, maupun sumberdaya tidak pulih untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan dilaksanakan melalui: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta kualitas sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan; Pengembangan penangkapan dan



pengelolaan sumberdaya perikanan di laut dan perairan pedalaman; Pengembangan kawasan budidaya laut, payau, dan air tawar yang menerapkan sistem usaha yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan; Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas usaha disertai peningkatan kelembagaan pendukungnya; Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, terutama kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumberdaya alam;

b. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang belum termanfaatkan secara optimal,

Kebijakan ini dilaksanakan melalui: peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan; peningkatan penyediaan pangan dan konsumsi masyarakat terhadap sumber protein ikan dan bahan baku industri di dalam negeri serta ekspor

Dari kebijakan yang telah ditetapkan di atas dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan ikan dalam jumlah dan mutu yang cukup terjangkau bagi masyarakat melalui rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi yang terkait dengan perikanan budidaya, dengan prioritas kegiatan adalah:

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
- 3) Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan
- 5) Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

Program ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Optimalisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan
- 2) Kegiatan Kualitas Hasil Tangkapan
- 3) Keg. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (RPPK)
- 4) Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- 5) Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman
- 6) Pemb, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Laut (TPI)
- 7) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan. Program ini dilaksanakan melalui :

- 1) Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan



- 3) Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan
- 4) Peningkatan Pelayanan dalam Rangka Menjaga Mutu Produk
- 5) Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk Yang Aman dan Berdaya Saing
- 6) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan
- 7) Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan
- 8) Peningkatan Perencanaan, Pengolahan data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makan Minum
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
- 12) Jasa Pelayanan Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistem informasi manajemen berbasis computerize, pengadaan sarana kantor pemerintah, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
- 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
- 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
- 7) Pemeliharaan Alat Kedokteran
- 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
- 10) Pemeliharaan Rutin Ponton / Kendaraan di atas Air Tidak Bermotor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dedikasi dan moral aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Program ini bertujuan untuk meningkatnya efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Asuransi Aset Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk membangun basis data informasi dan evaluasi sumber daya kelautan yang memadai untuk mendukung pendayagunaan kelautan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Kelautan
- 2) Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PENGENDALIAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengawasan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan untuk mencegah, mengendalikan dan memulihkan kerusakan ekosistem pantai. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Eksploitasi Sumberdaya Kelautan Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura

PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN AKSES JANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan perluasan jaringan para pembudidaya, nelayan, pengolah ikan dalam pengembangan usaha mereka masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pendidikan Kemasyarakatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH

Program ini bertujuan untuk memenuhi sarana prasarana pemerintahan yang memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diskanlut Jateng



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur Diskanlut Jateng dan terselenggaranya fungsi kehumasan, hukum dan organisasi dinas. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut
- 2) Peningkatan Fungsi Kehumasan Hukum dan Kelembagaan

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN LAUT

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelimpahan dan populasi ikan-ikan karang di lokasi fishing ground nelayan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Fishing ground bagi Nelayan Karimunjawa

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN BIDANG KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk mewujudkan system pengawasan sumberdaya wilayah pesisir dan kelautan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Lembaga Masyarakat Pesisir Bidang Kelautan

PROGRAM PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan teknologi kelautan dan tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/terapan bidang kelautan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pesisir. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pemetaan sepuluh jenis softcoral sebagai bahan biofarmasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM DAN KELEMBAGAAN BIDANG KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat bahari bagi siswa SD dan SMP melalui muatan local dan juga untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang kelautan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pelestarian sumberdaya kelautan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Meningkatkan Minat Bahari Bagi Siswa SD dan SMP Wilayah Pesisir
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMP

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta nelayan dan petani tambak dalam perlindungan dan pelestarian habitat vital dan ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan peran serta Masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem wilayah habitat



KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN

Belanja Tidak Langsung

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk Gaji, Tunjangan Pokok, dan Tambahan Penghasilan bagi PNS.

B. RENCANA KINERJA

Untuk pencapaian sasaran sesuai dengan program yang dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Pada tahun 2008 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan di dalam Program dan Kegiatan serta target sasaran (indikator kinerja) sebagai berikut :

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Budidaya sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi benih UPTD Provinsi Jateng : PBIAP Sluke, BBIL Karimunjawa, PBIAP Karanganyar Tugu, PBIAT Ngrajek, PBIAT Ambarawa, PBIAT Muntilan masing-masing sebesar 6.588.750 ekor, 8.000 ekor, 1.060 kg, 2.300.025 ekor, 412.335 ekor dan 1.618.943 ekor.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi ikan Gurame di Kab. Purbalangga sebesar 2.000 ton, di Kab. Banjarnegara 755 ton dan Sragen 97 ton. Meningkatnya produksi Patin di Kab. Sragen sebesar 34 ton, di Kab. Semarang 0.5 ton, Kab. Banjarnegara 0.5 ton. Meningkatnya produksi lele di Blora 34 ton dan Demak sebesar 7.000 ton. Meningkatnya produksi Kerapu di Karimunjawa sebesar 1 ton. Meningkatnya produksi budidaya udang windu di Satker Tugu dan Maribaya masing-masing sebesar 1 ton. Meningkatnya produksi budidaya Nila di Kab. Karanganyar sebesar 650 ton, Kab. Klaten sebesar 2.500 ton dan Jawa Tengah sebesar 15.000 ton. Berkembangnya budidaya Lobster air tawar di Muntilan dan Ambarawa. . Meningkatnya produksi benih Nila di Satker Janti sebesar 3.360.000 ekor. Meningkatnya benih ikan Gurame di Satker Muntilan sebesar 2.200 ekor. Meningkatnya benih ikan Lele di Satker Ngrajek sebesar 688.800 ekor.
- 3) Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kecepatan penanganan pengendalian penyakit ikan dan udang di Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah.
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi penangkapan ikan di perairan pedalaman di Kab. Wonosobo sebesar 119.15 ton, Banjarnegara sebesar 1.098 ton, Wonogiri sebesar 879.72 ton, Boyolali sebesar 356.5 ton dan Semarang sebesar 1000 ton. Meningkatnya produksi nila di KJA di Kab. Karanganyar sebesar 1 ton dan meningkatnya grass carp di kab. Semarang sebesar 8 ton.



5) Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi budidaya lele di Kab. Kendal sebesar 875 ton, Kab. Kudus 320 ton, Kab. Grobogan 223 ton, Kab Demak 7.000 ton, Kota Salatiga 97 ton dan Kota Semarang 12 ton. Meningkatnya produksi Vanamae di Kab. Brebes sebesar 30 ton, Kab. Pemalang 2 ton, Kab. Demak 2 ton, Kab. Pati 2 ton dan Kab. Rembang 4 ton. Meningkatnya produksi Bandeng di Kab. Pemalang sebesar 1.5260 ton, Kab. Kendal 333 ton, Kab. Demak 3.446 ton, Kab. Pati 15.915 ton, Kota Semarang 242 ton. Meningkatnya produksi budidaya rumput laut di Kab Pemalang sebesar 123 ton dan Kota Semarang sebesar 2 ton.

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Indikator keberhasilan pada masing-masing kegiatan pada program pengembangan agribisnis :

1) Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan pengusaha kecil dan manajemen usaha sebanyak 160 orang. Meningkatnya kesepahaman kerjasama penyakit ikan, Jaringan usaha dan pengembangan pemasaran di 9 provinsi. Semakin dikenalnya produk perikanan di masyarakat. Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jateng sebesar 15 kg/kap/th.

2) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan pengolah tradisional sebanyak 610 orang, meningkatnya metode uji LPPMHP (Semarang, Pekalongan, Cilacap) dan meningkatnya angka konsumsi makan ikan di Jateng sebesar 15 kg/kap/th.

3) Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terkendalinya mutu produk hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan di Kota Semarang, Pekalongan, Jepara, Pati, Batang, Cilacap dan terkendalinya penggunaan bahan beracun berbahaya (B3) di Kota Semarang, Pekalongan, Jepara, Pati, Batang, Rembang, Cilacap, Demak, Kendal, Pemalang.

4) Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk Yang Aman dan Berdaya Saing

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan para pengolah dalam diversifikasi hasil perikanan sebanyak 90 orang dan meningkatnya kemampuan SDM laboratorium 39 orang.

5) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang tata cara pengurusan maupun produk hukum yang memayungi perijinan usaha perikanan sebanyak 180 orang, terlaksananya penyampaian informasi dan tata cara pengurusan maupun produk hukum yang memayungi perijinan usaha perikanan di Dinas Provinsi. Meningkatnya percepatan proses perijinan usaha perikanan di 9 lokasi. Tersusunnya nota kesepahaman antar instansi terkait penerbit dokumen perijinan usaha perikanan sebanyak 30 orang.



- 6) Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi budidaya kolam di 6 kawasan agropolitan (kab.Semarang, Pemalang, Batang, Wonosobo, Purbalingga dan Kab. Magelang) masing-masing untuk ikan nila 294 ton, 37 ton, 69 ton, 7.214 ton, 636 ton, 2.917 ton dan ikan lele masing-masing sebesar 436 ton, 53 ton, 146 ton, 97 ton, 2.206 ton dan 697 ton.
- 7) Peningkatan Pelayanan dalam Rangka Menjaga Mutu Produk
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM petugas pengawas mutu sebanyak 90 orang. Terjaganya keselamatan kerja petugas pengawas mutu pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Terjaganya mutu ikan kualitas ekspor terutama untuk daerah Pantai Selatan.
- 8) Peningkatan Perencanaan, Pengolahan Data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya tervalidasinya data statistic perikanan, terwujudnya program/kegiatan th.2009, terwujudnya akuntabilitas Dinas Perikanan dan Kelautan serta terwujudnya system penyuluhan yang menjamin terselenggaranya penyuluhan perikanan profesional di dinas provinsi.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERIKANAN TANGKAP

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Perikanan Tangkap sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Optimalisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah berkembangnya produksi perikanan tangkap laut di Kab.Jepara, Batang, Cilacap dan Kebumen masing-masing sebesar 6.413,2 ton, 13.037,10 ton, 8.000 ton dan 1.115,12 ton.
- 2) Kegiatan Kualitas Hasil Tangkapan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap di Kota Tegal sebesar 25.199,06 ton dan Karimunjawa sebesar 15,5 ton.
- 3) Keg. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (RPPK)
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut Kota Pekalongan 56.011,67 ton, Pati 42.387,92 ton, Rembang 40.777,43 ton, Cilacap 8.000 ton, Kebumen 1.115,12 ton, Kota Semarang 44,70 ton, Kota Tegal 25.199,06 ton, Batang 13.037,10 ton dan Purworejo 23,08 ton.
- 4) Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terkendalinya eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap di Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Rembang.
- 5) Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan umum di Kab.Boyolali, Sragen dan Grobogan masing-masing 356,50 ton, 2.017,64 ton dan 614,46 ton.
- 6) Pemb, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Laut (TPI)
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi hasil tangkapan di PPI Pulolampes 122,5 ton, PPI Sarang 6.500 ton, PPI Puncel 164 ton, PPI Alasdowo 3 ton, PPI Bandungharjo 13 ton, PPI Sidakaya 105 ton, TPI Tanggulmalang 66 ton, PPI Tanjungsari 5.275 ton dan TPI Bajomulyo 18.580 Ton.
- 7) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan



Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Berkurangnya kejadian konflik nelayan di daerah perbatasan Jateng – Jatim.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan untuk pengiriman surat ke instansi daerah maupun pusat di 35 kab./kota, Pusat (5 dirjen), 15 unit UPTD, dan Dinas Provinsi
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana telekomunikasi, sarana air bersih, penerangan dan koneksi jaringan internet di Dinas Provinsi, dan 15 Unit UPTD.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pelelangan ikan di PPNP Pekalongan, PPSC Ciilacap, dan Pelabuhan III Tegal.
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng, PPP Tegal Sari, Balai Perbenihan, Satker Perbenihan, BPPI, Balai Mutu Hasil, dan Satker Lab.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya kinerja Dinas dan UPT Dinas di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng, Kantor Balai, Satker Perbenihan Hasil dan PPP Tegal Sari.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya kinerja Dinas dan UPT Dinas di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng, BPPI (Wil. PkIlg, Pati, Cilacap, Kr. Jawa), PPP Tegalsari, Balai Pengujian Mutu, LPPMHP (Smg, PkIlg, Clcp), Balai Perbenihan, dan Satker Perbenihan.
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang tertib dan lancar di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor dapat berjalan dengan baik di 5 unit Balai Perbenihan dan 12 unit Satker Perbenihan.
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan-bahan informasi di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng.
- 10) Penyediaan Makan Minum
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terbinanya sinkronisasi perencanaan program kegiatan perikanan dan kelautan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, BPPI (PkIlg, Clp, Pati), Balai Perbenihan, Satker Perbenihan, Satker LPPMHP (Clp, Smg, PkIlg).
- 12) Jasa Pelayanan Perkantoran
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kinerja aparatur di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya prasarana penunjang peningkatan SDM yang memadai dan nyaman di Satker Perbenihan, BBI Ngrajek, BPBAP Maribaya Tegal, BBI Muntilan, UPBAP Ambarawa, dan Guest House
- 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya prasarana gedung kantor yang memadai dan nyaman di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng, Balai, dan Satker.
- 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana transportasi yang memadai dan nyaman di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng.
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana kerja yang memadai dan nyaman di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng dan UPTD Provinsi.
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kerja yang memadai di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng.
- 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kerja yang memadai di Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng dan UPTD Provinsi.
- 7) Pemeliharaan Alat Kedokteran
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kinerja laboratorium perikanan yang memadai di LPPMHP (Pkg, Smg, Clp).
- 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kinerja alat berat yang memadai
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya prasarana gedung kantor yang memadai dan nyaman di Gedung BPPI Pekalongan dan Satker LPPMHP (Pkg, Clp).
- 10) Pemeliharaan Rutin Ponton / Kendaraan di atas Air Tidak Bermotor
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana pengerukan alur pelayaran yang memadai.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya *performance* pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya *skill* dan pengetahuan teknis pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.



- 2) Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut
Meningkatnya *skill* dan pengetahuan teknis pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Indikator keberhasilan kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Asuransi Aset Dinas Perikanan dan Kelautan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terjaminnya claim asuransi aset Dinas Perikanan dan Kelautan untuk Gedung Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng, 1 unit Mobil Sedan dan 1 unit Mobil Station.

PROGRAM INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA KELAUTAN

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Kelautan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas Terumbu Karang Buatan dalam memperhatikan populasi dan kelimpahan ikan di Jepara. Tersedianya informasi potensi sumberdaya kelautan wilayah provinsi di Rembang dan Pati.
- 2) Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya basis data pencemaran dan indeks kepekaan lingkungan di wilayah pesisir. Tersedianya basis data ekosistem pesisir dan degradasi fisik pantai di Pantura. Tersedianya basis data degradasi habitat vital ekosistem pesisir pasca tsunami di Pansel.

PROGRAM PENGENDALIAN EKSPLOARASI DAN EKSPLOITASI

Indikator keberhasilan kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir Pantura

PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN AKSES JANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN

- 1) Pendidikan Kemasyarakatan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan teknis para pembudidaya 480 orang, nelayan 350 orang, masyarakat pesisir 360 orang, pengolah ikan 270 orang dalam pengembangan usaha mereka masing-masing.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH

- 1) Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diskanlut Jateng
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan prasarana gedung kantor yang memadai dan nyaman di LPPMHP Semarang, BPPI Pekalongan dan BPPI Cilacap.



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan SDM aparatur Diskanlut yang professional dan berkualitas sebanyak 100 orang
- 2) Peningkatan Fungsi Kehumasan Hukum dan Kelembagaan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi pembangunan perikanan dan kelautan secara luas di masyarakat Jawa Tengah.

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN LAUT

- 1) Peningkatan Fishing ground bagi Nelayan Karimunjawa
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan hasil penangkapan laut di Karimunjawa sebesar 15,5 ton.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN BIDANG KELAUTAN

- 1) Peningkatan Lembaga Masyarakat Pesisir Bidang Kelautan
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas ekosistem pesisir di Jawa Tengah.

PROGRAM PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI KELAUTAN

- 1) Pemetaan sepuluh jenis softcoral sebagai bahan biofarmasi
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya data mengenai ketersediaan bahan biofarmasi yang diperoleh dari sintesa softcoral untuk bahan baku farmasi, kosmetik dan kesehatan .

PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM DAN KELEMBAGAAN BIDANG KELAUTAN

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Minat Bahari Bagi Siswa SD dan SMP Wilayah Pesisir
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah menciptakan siswa SD sebanyak 400 siswa dan SMP sebanyak 400 siswa untuk memberikan sumbangan pikiran tentang kebaharian dan meningkatkan kecintaan terhadap bahari.
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMP
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan bagi pengurus LKM sebanyak 30 orang. Meningkatkan mutu dan pelayanan bagi nasabah LKM terhadap 30 orang pengurus LKM.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

- 1) Peningkatan peran serta Masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem wilayah habitat
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah mangrove yang ditanam di Jawa Tengah sebesar 1.300.000 batang (th.2003 – 2008).



KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk :

1) Belanja Tidak Langsung

Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan kinerja aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 384 orang.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Sedangkan indikator manfaat dan dampak baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Sehingga indikator manfaat dan dampak tidak kami lakukan pengukuran.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan, yaitu merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{prosentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{prosentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Selengkapnya realisasi dari kelompok indikator kinerja dapat dilihat pada formulir PKK (lampiran 2)

2. Pengukuran pencapaian sasaran, yaitu tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dan dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Apabila semakin tinggi realisasi pencapaian sasaran menunjukkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{prosentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$



Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{prosentasepencapaianrencana kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Tingkat capaian sasaran selengkapnya pada Formulir PPS (lampiran 3).

Perlu diingat bahwa sasaran bukan merupakan sasaran spesifik yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab salah satu unit kerja, namun pencapaiannya harus merupakan hasil kinerja kegiatan dari berbagai unit kerja - unit kerja lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah serta seluruh *stakeholders* terkait. Dengan cara pembobotan seperti di atas dimungkinkan bahwa hasil pengukuran capaian kinerja dapat melebihi 100%.

Kategori pencapaian dari hasil pengukuran dengan cara pembobotan seperti di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Pencapaian Kinerja

Urutan	Rencana Capaian	Kategori Capaian
I	> 85	Sangat Baik
II	70 – 85	Baik
III	55 – 70	Cukup
IV	< 55	Kurang

B. EVALUASI KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.

Dari perhitungan-perhitungan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan hasil kinerja pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2008 telah mencapai target sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah meskipun masih dijumpai kendala-kendala dan kelemahan yang memerlukan peningkatan serta perbaikan di

masa mendatang. Adapun hasil kinerja fungsional Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 3. Hasil yang dicapai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008

URAIAN	SASARAN / REALISASI/ PENCAPAIAN	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008 ^{*)}
PERIKANAN TANGKAP					
Produksi (Ton)	TARGET	314.466,37	234.278,63	222.031,60	233.536,84
	REALISASI	208.763,40	199.115,30	182.872,90	183.787,26
	PENCAPAIAN	66,39	84,99	82,36	78,69
Nilai (Rp 1.000,00)	TARGET	1.457.636.842,83	952.181.822,33	983.333.938,99	1.004.138.225,01
	REALISASI	922.177.539,00	890.473.815,30	866.518.113,70	889.445.175,01
	PENCAPAIAN	63,27	93,52	88,12	88,57
PERIKANAN BUDIDAYA					
Produksi (Ton)	TARGET	97.186,74	89.026,97	102.669,98	108.585,11
	REALISASI	101.080,90	91.473,89	114.007,80	117.428,03
	PENCAPAIAN	104,01	102,75	111,04	108,14
Nilai (Rp 1.000,00)	TARGET	1.003.020.925,76	1.111.228.264,53	1.042.859.203,51	1.103.345.037,32
	REALISASI	1.190.388.736,00	988.651.632,25	1.305.231.253,00	1.452.770.624,50
	PENCAPAIAN	118,68	88,97	125,15	131,66
PERIKANAN TOTAL					
Produksi (Ton)	TARGET	331.465,37	407.473,99	324.701,58	342.121,95
	REALISASI	300.196,20	305.549,18	296.880,70	301.215,29
	PENCAPAIAN	90,57	74,99	91,43	88,04
Nilai (Rp 1.000,00)	TARGET	1.955.202.748,09	2.657.780.954,77	1.919.571.061,90	2.107.483.262,32
	REALISASI	2.080.862.551,30	1.940.833.454,58	2.171.749.366,70	2.342.215.799,52
	PENCAPAIAN	106,10	73,02	113,13	111,13
EKSPOR					
VOLUME (Kg)	TARGET	17.868.869,27	17.868.869,27	18.226.166,62	22.036.699,11
	REALISASI	17.064.736,82	17.064.736,82	19.938.399,15	17.944.559,24
	PENCAPAIAN	95,50	95,50	109,39	81,43
NILAI (US \$)	TARGET	80.225.353,91	80.225.353,91	86.242.255,45	92.710.424,61
	REALISASI	70.614.933,33	70.614.933,33	74.643.244,22	67.178.919,80
	PENCAPAIAN	88,02	88,02	86,55	72,46
KONSUMSI IKAN (kg/kapita/th)					
	TARGET	13,00	13,30	13,70	14,00
	REALISASI	9,47	13,76	13,32	13,50
	PENCAPAIAN	72,85	103,45	97,22	96,42
PAD (Rp. 1.000,00)					
	TARGET	17.963.497,000	15.100.796,000	15.000.000,000	16.135.944.000
	REALISASI	13.296.539,921	12.611.926,258	13.731.076,23	16.938.108.109
	PENCAPAIAN	74,02	83,52	91,54	104,97

Ket : *) Data Sementara



Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 59 kegiatan dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar 96,52 % (lampiran 4)

KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk :

1) Belanja Tidak Langsung

Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan kinerja aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 384 orang dengan capaian indikator kinerja sebesar 95,45 %.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Keberhasilan dan Kegagalan

Dari perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dicapai realisasi nilai rata-rata inputs (masukan) adalah 90,08 %, artinya bahwa hampir seluruh anggaran yang tersedia telah digunakan dengan **sangat baik** walaupun terdapat perubahan sistem administrasi keuangan dari manajemen proyek ke manajemen kegiatan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah penyerapan keuangan tidak seperti yang direncanakan dalam rencana operasional kegiatan dan prosentase penyerapan anggaran lebih banyak tertuntuk pada akhir tahun anggaran.

Realisasi nilai rata-rata outputs (keluaran) yaitu 99,83% artinya bahwa seluruh kegiatan fisik telah dilaksanakan dengan **sangat baik**. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui kendala-kendala meskipun rencana dan norma-norma teknis yang telah ditata dengan baik, sebagai contoh dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat ada pelatihan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya kesesuaian jadwal antara tentor dengan nelayan.

Nilai rata-rata outcomes (hasil) dari semua kegiatan adalah 100 % (sangat baik). Hal ini terukur berdasarkan capaian sasaran target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, artinya meskipun pembangunan sektor perikanan dan kelautan sebagian besar dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait (swasta dan masyarakat), namun strategi dan perencanaan pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan telah tepat sebagaimana yang diharapkan meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Di bidang perikanan tangkap, terjadi penurunan produksi dan raman TPI yang disebabkan oleh penurunan produksi penangkapan ikan. Penurunan produksi ini disebabkan oleh :

- a. Kelangsungan pengelolaan perikanan di laut pada tingkat eksplotasi tinggi (*fully exploited*) dengan indikator :
 - Daerah penangkapan meluas ke selat Makasar dan Laut China Selatan.
 - Jumlah kapal pukat cincin selalu meningkat dengan penggunaan alat Bantu penangkapan berupa lampu listrik dengan kekuatan tenaga ribuan watt.
 - Adanya indikator ekosistem dengan kemunculan sejumlah species dalam jumlah yang relatif banyak dakan dya tuga tahun terakhir, seperti: *Etemen*, *Mene Maculata*, dan ikan anyam-anyaman, *Aluterus monoceras*.
- b. Dampak kenaikan BBM terhadap usaha penangkapan ikan di laut yang masih belum sepenuhnya pulih. Kenaikan ini menyebabkan biaya produksi menjadi membumbung tinggi sementara harga ikan di pasar tidak mengalami kenaikan yang significant sehingga nelayan mengalami kerugian.
- c. Faktor alam yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca dan gelombang tinggi, terbatasnya stock ikan di alam yang disebabkan oleh musim pemijahan dan ruaya (migrasi ikan).



Benefit (manfaat) dan dampak (impact) suatu kegiatan belum dapat dilihat hasilnya dalam kurun waktu yang singkat, sehingga data yang relevan, lengkap dan akurat belum bisa tersajikan pada laporan ini.

Secara umum nilai capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah adalah sangat baik (96,52%). Hal ini dilihat dari capaian berbagai indikator kinerja, baik ditinjau dari hasil kinerja bidang ekonomi (PDRB, Investasi, Perdagangan), bidang teknis (produksi, konsumsi), maupun fungsional (kawasan, KBT, dll) yang kesemuanya secara umum menunjukkan peningkatan. Capaian ini dicapai dari rata-rata 59 kegiatan yang kesemuanya mempunyai capaian di atas 85% (sangat baik).

2. Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang ada pada akhir tahun 2008 tersebut antara lain :

1. Terdapatnya ketidakseimbangan / disparitas tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di perairan utara dan selatan Jawa Tengah yang disebabkan adanya ketimpangan yang besar baik sarana dan prasarana perikanan tangkap, perbenihan ikan, perikanan budidaya dan pasca panen;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai baik pada perikanan tangkap, perbenihan ikan, perikanan budidaya dan pasca panen serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan (PP), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
3. Sumberdaya ikan yang semakin terbatas, IUU (*illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing, ketimpangan pemanfaatan sumberdaya ikan yang menyebabkan konfil antar wilayah, nelayan;
4. Masih tingginya dominasi usaha skala kecil dengan teknologi, produktivitas dan efektifitas yang rendah;
5. Masih tingginya potensi terjadinya gempa tsunami dan gelombang pasang di wilayah pantai demikian juga potensi tanah lonsor di wilayah pedalaman.
6. Pengelolaan/manajemen pembudidaya ikan yang belum mengikuti *good aquaculture practice* yang dicirikan dengan belum digunakannya teknologi yang dianjurkan, belum ramah lingkungan, dan produk yang dihasilkan berkualitas tidak baik.
7. Masih terbatasnya ketersediaan induk dan benih ikan yang bermutu.
8. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun.
9. Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan baik perorangan, koperasi maupun swasta masih bersifat tradisional dengan mutu produk, syarat teknis, sanitas dan higienis yang rendah dan masih jauh dari persyaratan mutu ekspor.
10. Tingginya pencemaran lingkungan pesisir/ pantai di wilayah laut Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Kabupaten Pati, Demak, Tegal, Pekalongan dan Cilacap;
11. Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Tegal, Pekalongan, Semarang, Kabupaten Brebes, Kendal, Demak, Pati, Rembang, Cilacap;
12. Tingginya kerusakan ekosistem *mangrove* dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di kawasan Pantai Utara dan Selatan, khususnya di Kepulauan Karimunjawa dan kawasan pantai Cilacap-Kebumen;
13. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan;
14. Belum terbangunnya basis data sistem informasi sumberdaya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengawasan kegiatan eksploitasi sumberdaya kelautan secara lestari dan berkelanjutan;



3. Langkah-Langkah Inisiatif yang akan Diambil

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya dan pemasaran hasil usaha perikanan dan kelautan di wilayah selatan Jawa Tengah
2. Melengkapi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
3. Penerapan pengelolaan perikanan (*fisheries management*) secara bertahap berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
4. Rasionalisasi, nasionalisasi, dan modernisasi armada perikanan tangkap secara bertahap dalam rangka menghidupkan industri dalam negeri dan berkepihakan kepada nelayan lokal;
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana alam;
6. Pemanfaatan dan pemanenan sumberdaya akuatik secara serasi dengan lingkungan, yang mencakup metode dan praktek budidaya yang tidak berbahaya terhadap ekosistem dan sumberdayanya, memenuhi standar kebersihan yang dibutuhkan, serta praktek komersial yang menyajikan konsumen produk yang berkualitas baik.
7. Melakukan rekayasa genetika melalui persilangan untuk menghasilkan induk dan benih yang unggul dan bermutu serta melakukan sosialisasi dan pembinaan sertifikasi benih;
8. Memanfaatkan bahan baku (*raw material*) pakan yang mudah didapat dan mencari bahan alternatif yang murah;
9. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi H.A.C.C.P sebagai suatu reorientasi terhadap sistem pembinaan dan pengawasan mutu;
10. Meminimalisasi tingkat pencemaran untuk mendukung kegiatan perikanan pada kawasan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan sumberdaya pesisir dan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan wilayah pesisir;
12. Penanaman kembali hutan bakau (*mangrove*) dan penenggelaman terumbu karang buatan di daerah pantai yang telah mengalami kerusakan;
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sistem agribisnis, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam;
14. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2008 Dinas Perikanan dan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 43.305.239.000,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2008 terealisasi sebesar Rp. 40.169.406.225,00 (92,76%). Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :



Berdasarkan Sumber Dana

Anggaran serta realisasi per kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	42.000.000	37.733.000	89,84
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	813.300.000	778.824.181	95,76
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.485.175.000	1.463.366.600	98,53
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	212.844.250	94,60
5.	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	167.998.000	164.712.000	98,04
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	37.920.000	37.891.500	99,92
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	442.130.000	383.708.000	86,79
8.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.500.000	24.934.500	97,78
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	25.000.000	11.694.000	46,78
10.	Penyediaan Makan Minum	165.463.000	112.741.250	68,14
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	738.130.000	737.883.932	99,97
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	627.724.000	556.436.000	88,64

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
13.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	550.000.000	459.860.690	83,61
14.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	460.000.000	450.669.566	97,97
15.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	408.500.000	408.322.635	99,96
16.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	72.000.000	57.068.000	79,26
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	25.000.000	23.410.000	93,64
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	193.810.000	193.649.000	99,92
19.	Pemeliharaan Alat Kedokteran	75.000.000	70.590.700	94,12
20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat	100.000.000	24.457.500	24,46
21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	2.272.443.000	2.156.630.680	94,90
22.	Pemeliharaan Rutin Ponton / Kendaraan di atas Air Tidak Bermotor	100.000.000	29.740.000	29,74
23.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	195.936.000	183.523.000	93,66
24.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	69.000.000	68.940.000	99,91
25.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut	218.480.000	208.657.000	95,50

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
26.	Asuransi Aset Dinas Perikanan dan Kelautan	11.000.000	10.850.000	98,64
27.	Pendidikan Kemasyarakatan	1.420.000.000	1.215.693.000	85,61
28.	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Dinlutkan Jateng	450.000.000	410.432.000	91,21
29.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinlutkan	100.000.000	100.000.000	100
30.	Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	200.000.000	159.194.000	79,60
31.	Optimalisasi Alat TAngkap Ramah Lingkungan	328.000.000	241.612.000	73,66
32.	Kualitas Hasil Tangkapan	250.000.000	226.281.000	90,51
33.	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)	575.000.000	523.634.300	91,07
34.	Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap	285.000.000	238.132.900	83,56
35.	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	400.000.000	358.710.000	89,68
36.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarpras Perikanan Laut (TPI)	1.923.340.000	1.402.367.850	72,91
37.	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	120.000.000	120.000.000	100

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
38.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan	1.540.550.000	1.264.990.760	82,11
39.	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	2.017.000.000	1.822.766.000	90,37
40.	Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	510.000.000	498.094.000	97,67
41.	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	335.000.000	330.596.000	98,69
42.	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	1.685.000.000	1.650.225.000	97,94
43.	Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen	1.670.000.000	1.447.165.750	86,66
44.	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.261.000.000	1.123.655.800	89,11
45.	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan	195.000.000	179.496.000	92,05
46.	Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk yang Aman dan Berdaya Saing	400.000.000	383.894.000	95,97
47.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan	400.000.000	397.820.000	99,46
48.	Pengembangan Kawasan Perikanan	300.000.000	291.445.000	97,15
49.	Peningkatan perencanaan, Pengolahan Data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan	959.000.000	916.331.000	95,55

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
50.	Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan	200.000.000	193.165.000	95,58
51.	Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Kelautan	200.000.000	194.902.500	97,45
52.	Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura	200.000.000	197.394.000	98,70
53.	Peningkatan Fishing Ground Bagi Nelayan di Karimunjawa	200.000.000	197.829.000	98,91
54.	Peningkatan Lembaga Masyarakat Pesisir	150.000.000	148.814.000	99,21
55.	Kegiatan Pemetaan 10 Jenis Softcoral sebagai Bahan Biofarmasi	150.000.000	146.522.000	97,68
56.	Peningkatan Minat Bahari Bagi Siswa SD dan SMP di Wilayah Pesisir	60.000.000	59.159.000	98,60
57.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMP	30.000.000	29.898.000	99,66
58.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Wilayah Habitat	100.000.000	99.234.000	99,23
59.	Belanja Tidak Langsung	14.798.840.000	14.125.539.172	95,45
JUMLAH		43.305.239.000	40.169.406.225	92,76

2. Capaian Fisik Kegiatan

Capaian rata-rata fisik kegiatan dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dapat dilihat tabel 6 berikut :

Tabel 6. Capaian Rata-Rata Fisik Kegiatan Anggaran APBD Pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	42.000.000	100,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	813.300.000	100,00
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.485.175.000	100,00
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	100,00
5.	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	167.998.000	100,00
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	37.920.000	100,00
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	442.130.000	100,00
8.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.500.000	100,00
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	25.000.000	100,00
10.	Penyediaan Makan Minum	165.463.000	100,00
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	738.130.000	100,00
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	627.724.000	100,00
13.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	550.000.000	100,00
14.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	460.000.000	100,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
15.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	408.500.000	100,00
16.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	72.000.000	100,00
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	25.000.000	100,00
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	193.810.000	100,00
19.	Pemeliharaan Alat Kedokteran	75.000.000	100,00
20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat	100.000.000	100,00
21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	2.272.443.000	100,00
22.	Pemeliharaan Rutin Ponton / Kendaraan di atas Air Tidak Bermotor	100.000.000	100,00
23.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	195.936.000	100,00
24.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	69.000.000	100,00
25.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut	218.480.000	100,00
26.	Asuransi Aset Dinas Perikanan dan Kelautan	11.000.000	100,00
27.	Pendidikan Kemasyarakatan	1.420.000.000	90,00
28.	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Dinlutkan Jateng	450.000.000	100,00
29.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinlutkan	100.000.000	100,00
30.	Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	200.000.000	100,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
31.	Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	328.000.000	100,00
32.	Kualitas Hasil Tangkapan	250.000.000	0,00
33.	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)	575.000.000	100,00
34.	Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap	285.000.000	100,00
35.	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	400.000.000	100,00
36.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarpras Perikanan Laut (TPI)	1.923.340.000	100,00
37.	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	120.000.000	100,00
38.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan	1.540.550.000	100,00
39.	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	2.017.000.000	100,00
40.	Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	510.000.000	100,00
41.	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	335.000.000	100,00
42.	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	1.685.000.000	55,00
43.	Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen	1.670.000.000	100,00
44.	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.261.000.000	100,00
45.	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan	195.000.000	100,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
46.	Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk yang Aman dan Berdaya Saing	400.000.000	100,00
47.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan	400.000.000	100,00
48.	Pengembangan Kawasan Perikanan	300.000.000	100,00
49.	Peningkatan perencanaan, Pengolahan Data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan	959.000.000	100,00
50.	Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan	200.000.000	100,00
51.	Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Kelautan	200.000.000	100,00
52.	Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura	200.000.000	100,00
53.	Peningkatan Fishing Ground Bagi Nelayan di Karimunjawa	200.000.000	100,00
54.	Peningkatan Lembaga Masyarakat Pesisir	150.000.000	100,00
55.	Kegiatan Pemetaan 10 Jenis Softcoral sebagai Bahan Biofarmasi	150.000.000	100,00
56.	Peningkatan Minat Bahari Bagi Siswa SD dan SMP di Wilayah Pesisir	60.000.000	100,00
57.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMP	30.000.000	100,00
58.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Wilayah Habitat	100.000.000	100,00
59.	Belanja Tidak Langsung	14.798.840.000	95,45
JUMLAH		43.305.239.000	92,76

3. Capaian Indikator Efisiensi

Dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 hampir semua pencapaian fisiknya mencapai 100%, sedangkan pencapaian fisik kegiatan rata-rata 96,77 %. Dari seluruh kegiatan terdapat kinerja efisiensi sebesar 9,31 % karena adanya penggunaan anggaran yang lebih kecil dari pencapaian fisik, yaitu pencapaian fisik kegiatan sebesar 96,77 % dengan pencapaian anggaran 94,01%. Adapun dari 47 kegiatan terdapat 1 kegiatan yang seimbang antara realisasi fisik dan keuangan sehingga tidak terdapat efisiensi kinerja yaitu Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan.

Rincian efisiensi kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Efisiensi Kinerja Kegiatan Anggaran APBD Pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	42.000.000	10,16
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	813.300.000	4,24
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.485.175.000	1,47
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	5,4
5.	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	167.998.000	1,96
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	37.920.000	0,08
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	442.130.000	13,21
8.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.500.000	2,22
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	25.000.000	53,22
10.	Penyediaan Makan Minum	165.463.000	31,86
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	738.130.000	0,03
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	627.724.000	11,36

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
13.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	550.000.000	16,39
14.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	460.000.000	2,03
15.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	408.500.000	0,04
16.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	72.000.000	20,74
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	25.000.000	6,36
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	193.810.000	0,08
19.	Pemeliharaan Alat Kedokteran	75.000.000	5,88
20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat	100.000.000	75,54
21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	2.272.443.000	5,1
22.	Pemeliharaan Rutin Ponton / Kendaraan di atas Air Tidak Bermotor	100.000.000	70,26
23.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	195.936.000	6,34
24.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	69.000.000	0,09
25.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut	218.480.000	4,5
26.	Asuransi Aset Dinas Perikanan dan Kelautan	11.000.000	1,36
27.	Pendidikan Kemasyarakatan	1.420.000.000	14,39
28.	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Dinlutkan Jateng	450.000.000	8,79
29.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur	100.000.000	4,5

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
	Dinlutkan		
30.	Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	200.000.000	20,4
31.	Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	328.000.000	26,34
32.	Kualitas Hasil Tangkapan	250.000.000	9,49
33.	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)	575.000.000	8,93
34.	Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap	285.000.000	16,44
35.	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	400.000.000	10,32
36.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarpras Perikanan Laut (TPI)	1.923.340.000	27,09
37.	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	120.000.000	0
38.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan	1.540.550.000	17,89
39.	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	2.017.000.000	9,63
40.	Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	510.000.000	2,33
41.	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	335.000.000	1,31
42.	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	1.685.000.000	2,06
43.	Pengembangan dan Pembinaan Pasca Panen	1.670.000.000	13,34
44.	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.261.000.000	10,89

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	5
45.	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan	195.000.000	7,95
46.	Bimbingan Teknologi Pengembangan Produk yang Aman dan Berdaya Saing	400.000.000	4,03
47.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perijinan	400.000.000	0,54
48.	Pengembangan Kawasan Perikanan	300.000.000	2,85
49.	Peningkatan perencanaan, Pengolahan Data dan Evaluasi Perikanan dan Kelautan	959.000.000	4,45
50.	Pengelolaan Basis Data dan Basis Model Habitat Vital Perikanan dan Kelautan	200.000.000	4,42
51.	Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Kelautan	200.000.000	2,55
52.	Penanganan Abrasi dan Pemanfaatan Akresi di Pantura	200.000.000	1,3
53.	Peningkatan Fishing Ground Bagi Nelayan di Karimunjawa	200.000.000	1,09
54.	Peningkatan Lembaga Masyarakat Pesisir	150.000.000	0,79
55.	Kegiatan Pemetaan 10 Jenis Softcoral sebagai Bahan Biofarmasi	150.000.000	2,32
56.	Peningkatan Minat Bahari Bagi Siswa SD dan SMP di Wilayah Pesisir	60.000.000	1,4
57.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMP	30.000.000	0,34
58.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Wilayah Habitat	100.000.000	99,23
59.	Belanja Tidak Langsung	14.798.840.000	4,55
JUMLAH		43.305.239.000	7,24

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka perhitungan LAKIP dilakukan dengan menggunakan format Rencana Kinerja Tahunan (RKT), format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), dimana di dalam penyusunan LAKIP dengan sistem ini cara pengukuran kinerja diarahkan untuk mengukur kegiatan-kegiatan dalam pencapaian sasaran yang terkait, pengukuran kinerja lebih mencerminkan keterkaitan kegiatan-kegiatan secara proposional dan logis bagi pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Namun demikian dalam memberikan nilai capaian masih dijumpai adanya beberapa kendala karena tidak semua kegiatan-kegiatan dapat langsung mencapai sasaran pada tahun yang bersangkutan akan tetapi sasaran mungkin baru akan dicapai pada beberapa tahun berikutnya.

Secara global hasil pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Tengah tahun 2008 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada tahun 2008 ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian kualitatif sebesar **96,52%**. Hasil ini sebagian besar telah mencapai target sasaran tahun yang telah ditetapkan pada Renstra, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang. Apabila ditinjau dari kategori yang diterapkan maka capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
Terbangun, terehabilitasi serta terpeliharanya sarana dan prasarana perikanan (indikator sasaran : 21)	18	> 85	Sangat baik
	-	70 – 85	Baik
	2	55 – 70	Cukup
	1	< 55	Kurang
Termanfaatkannya potensi sumberdaya perikanan baik tangkap maupun budidaya secara optimal, sehingga mampu meningkatkan	6	> 85	Sangat baik
	-	70 – 85	Baik
	-	55 – 70	Cukup
	-		Kurang



SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
kesejah-teraan masyarakat (indikator sasaran : 6)		< 55	
Terbangunnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya jumlah dan mutu benih ikan (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Berkembangnya usaha perikanan budidaya (indikator sasaran : 11)	11 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Berkembangnya alat tangkap yang sesuai dengan karakteristik daerah <i>fishing ground</i> tujuan penangkapan (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terciptanya iklim yang kondusif mendorong investasi di bidang agribisnis perikanan (indikator sasaran : 8)	7 1 - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya efisiensi usaha perikanan sehingga produk perikanan yang dihasilkan mempunyai daya saing tinggi (indikator sasaran : 3)	3 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
Terdongngnya masyarakat agar mau dan mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui pengembangan kawasan dan usaha agribisnis perikanan (indikator sasaran : 19)	19 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Tersedianya data dan informasi mengenai potensi dan penyebaran sumberdaya perikanan (indikator sasaran : 3)	3 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya kelancaran dan percepatan kontribusi PAD (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur PEMDA untuk mendukung terlaksananya <i>Good Governance</i> (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kegiatan riset dan pengembangan teknologi kelautan dan tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna / terapan bidang kelautan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pesisir	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
(indikator sasaran : 2)			
Meningkatnya pengendalian dan pemulihan kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital (indikator sasaran : 4)	4 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terbangunnya masyarakat pesisir / nelayan sekaligus meningkatkan kemampuan, kepedulian, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta dunia usaha dan aparat pemerintah dalam pendayagunaan maupun pelestarian sumberdaya kelautan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
JUMLAH	88		

Dari capaian secara kumulatif sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dapat diraih dengan kinerja capaian “*sangat baik*”, meskipun masih ada indikator sasaran yang mempunyai nilai capaian dibawah 55% yaitu pada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. Sedangkan untuk kegiatan yang lain rata-rata capaian sasaran kinerja di atas 85%.

B. SARAN

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi yang tinggi dari aparat yang menangani sektor perikanan dan kelautan, baik dari tingkat provinsi maupun Kab./Kota.
2. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan tergantung pada partisipasi seluruh *stakeholders* perikanan dan kelautan Jawa Tengah, maka faktor kerja sama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

3. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pembudaya ikan dan nelayan sebagai objek pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Tengah.



LAMPIRAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, atau menjawab dan merangkan kinerja instansi kepada pihak yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah.

Untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas kinerja diperlukan suatu sistem yaitu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari indikator serta mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah adalah Instansi Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 Bagian Tata Usaha, 5 Sub Dinas, 5 Balai dan 1 Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.

Dengan berorientasi kepada Rencana Strategik tahun 2004 – 2008 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, maka dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan sasaran serta menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu : 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dijabarkan ke dalam 5 kegiatan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dijabarkan ke dalam 7 kegiatan; 3) Program Pengembangan Agribisnis, yang dijabarkan ke dalam 8 kegiatan; 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan ke dalam 12 kegiatan; 5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dijabarkan ke dalam 10 kegiatan; 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dijabarkan ke dalam 2 kegiatan; 8) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 9) Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan, dijabarkan ke dalam 2 kegiatan; 10) Program Pengendalian Eksplorasi dan Eksploitasi, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 11) Program Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 13) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah, dijabarkan ke dalam 2 kegiatan; 14) Program Pengembangan Usaha Perikanan Laut, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 15) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Bidang Kelautan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 16) Sistem Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 17) Program Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Bidang Kelautan; 18) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan dan 19) Kegiatan / anggaran rutin berupa Belanja Tidak Langsung. Guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. Rp. 43.305.239.000,00 dimana pada akhir Desember 2008 terealisasi sebesar Rp. Rp. 40.169.406.225,00 (92,76 %).

Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan (sejumlah 47 kegiatan) berdasarkan rumus yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar **96,52%**, dimana kesemua kegiatan tersebut mempunyai capaian kinerja di atas 85%.



Sebagai Dinas teknis penyumbang PAD, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi pada tahun 2008 telah mampu memberikan kontribusi PAD dari sektor Perikanan dan Kelautan kepada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.16.938.108.109,00 atau 104,97% dari target PAD yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.135.944.000,00. Unit-Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyumbangkan PAD yaitu : (i) Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pekalongan, (ii) Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Cilacap, (iii) Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati, (iv) Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan, (v) Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan (vi) Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.

